



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Tlp. 4234892 Fax. 4234892 Bandung

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SELAKU

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANDUNG**

NOMOR : KI.04.01/467 – Diskominfo/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyediakan panduan dan kerangka acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan para pemangku kepentingan untuk memberikan layanan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung guna menentukan dan atau menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandung tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 480/Kep.021.Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan:

1. Rekomendasi Tim Pertimbangan Layanan Informasi Pemerintah Kota Bandung Perihal Uji Konsekuensi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Focus General Discussion Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan Pada Tanggal 16 Juli 2019 di Hotel Grand Pacific Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Maret 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG,  
SELAKU-PPID UTAMA KOTA BANDUNG**



ANTON SUNARWIBOWO, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690810 199703 1 003

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku  
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandung  
 Nomor: KI.04.01/467 – Diskominfo/III/2020  
 Tanggal: 29 Maret 2020

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKI INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKI INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
1.	Biodata Elektronik PNS (Database)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; 2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi di PNS yang bersifat rahasia	1. Dinas Pekerjaan Umum, 2. Kecamatan Buahbatu, 3. PD Air Minum Tirtawening, 4. Rumah Sakit Umum Daerah, 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 6. Kecamatan Batununggal, 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 8. Dinas Pemuda dan Olahraga, 9. Kecamatan Cibeunying Kidul, 10. Badan Penglolaan Pendapatan Daerah, 11. Dinas Penataan Ruang, 12. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 13. Kecamatan Astana Anyar, 14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
						15. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda, 16. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda, 17. Rumah Sakit Umum Daerah, 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 20. Kecamatan Cibiru, 21. Sekretariat DPRD, 22. Kecamatan Ujungberung, 23. Kecamatan Andir, 24. Kecamatan Cicendo, 25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 26. Dinas Perdagangan dan Industri, 27. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, 28. Bagian Humas Setda, Kecamatan Antapani, 29. Kecamatan Cinambo, 30. PD. Kebersihan, 31. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 32. Kecamatan Babakan Ciparay, 33. Kecamatan bandung Kulon, 34. PD Pasar Bermartabat, 35. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
2	Daftar Nilai DP-3 PNS	1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaia 2. PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 3. Dinas Pemuda Dan Olah Raga, 4. Kecamatan Batununggal, 5. Kecamatan Buahbatu, 6. PD Kebersihan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
3	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan : > Daftar keuangan dan pendapatan pegawai. > Rekening dan tabungan pegawai. > Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan	Penyalahgunaan data pegawai/ASN dan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai terproteksi	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga, 3. Kecamatan Buahbatu, 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 5. Rumah Sakit Umum Daerah, 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 7. Kecamatan Batununggal, 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 9. Kecamatan Batununggal
4	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi di PNS yang bersifat rahasia	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga, 4. Rumah Sakit Umum Daerah, 5. Kecamatan Buah Batu, 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 8. Kecamatan Bojongloa Kidul, 9. Kecamatan Batununggal, 10. Kecamatan Cibeunying Kaler, 11. Kecamatan Coblong, 12. Kecamatan Panyileukan, 13. Kecamatan Sukajadi, 14. Kecamatan Sukasari, 15. Kecamatan Sumur Bandung, 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 17. Kecamatan Ujungberung,
5	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi di PNS yang bersifat rahasia	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga, 4. Kecamatan Buah Batu, 5. Rumah Sakit Umum Daerah, 6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan Pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2. Rumah Sakit Umum Daerah, 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 4. Kecamatan Bandung Kidul, 5. Kecamatan Cibiru, 6. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7	Data rekam medis pasien (PNS) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi di PNS yang bersifat rahasia	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2. Dinas Pekerjaan Umum, 3. PDAM Tirtawening, 4. Rumah Sakit Umum Daerah, 5. Dinas koperasi dan UMKM, 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 8. Kec. Bojongloa Kidul
8	HPS (Harga Perkiraan Sendirian)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses Pengadaan barang/ jasa	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara sistematis (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	1. DPMPSTSP 2. Dinas Pemuda Dan Olah Raga 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. PD Kebersihan 5. PD Pasar Bermartabat 6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 7. Bagian Layanan Pengadaan Setda 8. Kecamatan Cibeunying Kaler 9. Kecamatan Coblong 10. Kecamatan Panyileukan 11. Kecamatan Sukasari 12. Kecamatan Sumur Bandung 13. Rumah Sakit Umum Daerah 14. Sekretariat DPRD

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
9	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindak 18system18r pengerusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>4. DPMPTSP</li> <li>5. Dinas Pemuda Dan Olah Raga</li> <li>6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> <li>7. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana</li> <li>8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>9. Kecamatan Bandung Kidul</li> <li>10. Kecamatan Bandung Wetan</li> <li>11. Kecamatan Cibeunying Kaler</li> <li>12. Kecamatan Cibiru</li> <li>13. Kecamatan Coblong</li> <li>14. Kecamatan Panyileukan</li> <li>15. Kecamatan Sukajadi</li> <li>16. Kecamatan Sukasari</li> <li>17. Kecamatan Sumur Bandung</li> <li>18. PD Pasar Bermartabat</li> <li>19. Rumah Sakit Umum Daerah</li> <li>20. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak</li> </ol>
10	Internet Protokol/ IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang persandian dan telekomunikasi, diskominfo</li> <li>2. DPMPTSP</li> <li>3. Dispora</li> <li>4. Disbudpar</li> <li>5. BPPD</li> <li>6. kec.batununggal</li> <li>7. kec.cibeunying kaler</li> <li>8. kec.panyileukan</li> <li>9. kec.sukasari</li> <li>10. RSUD</li> <li>11. Kecamatan Coblong</li> </ol>
11	Bandwith Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Menjaga/ melindungi hak akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskominfo</li> <li>2. DPMPTSP</li> <li>3. Dispora</li> <li>4. BPPD</li> <li>5. Disbudpar</li> <li>6. RSUD</li> </ol>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
12	Kode akses Elektronik dan user/ password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan sistem jaringan	1. DPMPTSP 2. Dispora 3. BPPD 4. RSUD 5. PD Pasar Bermartabat
13	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	1. Disdukcapil 2. Dispora 3. DPMPTSP 4. Kec.batununggal 5. RSUD 6. BPPD
14	Sistem Management Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	1. DPPKB 2. diskominfo 3. DPMPTSP 4. Disbudpar 5. Diskar PB 6. kec.bandung kidul 7. kec.cibeunying kaler 8. kec.cibiru 9. kec.coblong 10. kec.panyileukan 11. kec.sukasari 12. kec.sumur bandung 13. DP3APM 14. Dispora 15. RSUD 16. BPPD 17. Kec. Coblong 18. Kec. Sumur Bandung 19. PDAM Tirtawening



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
15	<p>Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan 24system24,</li> <li>2. Pemeriksaan kasus,</li> <li>3. Pemeriksaan khusus,</li> <li>4. Review laporan keuangan,</li> <li>5. Evaluasi/pemantauan</li> <li>6. Naskah Hasil Pemeriksaan NHP</li> <li>7. Kertas Kerja Audit (KKA)/ Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf I,</li> <li>2. Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03 2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2007 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kose etik pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I bab Norma pelaporan huruf a.</li> <li>4. Permendagri 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan <u>Penyenggaraan Pemda</u></li> </ol>	Tidak Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara 24system24re</li> <li>2. Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP.</li> <li>3. Melanggar peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP</li> <li>4. Akan terjadi kesalahpahaman penerima informasi dengan sumber informasi apabila temuan-temuan tersebut belum ditindak lanjuti</li> </ol>	Membantu badan system dalam menentukan dan mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kec.cibeunying kaler</li> <li>2. Dinas penataan ruang</li> <li>3. DPPKB</li> <li>4. Dinas pangan dan pertanian</li> <li>5. Disdukcapil</li> <li>6. Dinas KUMKM</li> <li>7. Disbudpar</li> <li>8. Diskar PB</li> <li>9. Bagian program design</li> <li>10. Kec.Antapani</li> <li>11. Kec. Babakan ciparay</li> <li>12. Kec. Bandung kulon</li> <li>13. Kec.Bojongloa kaler</li> <li>14. Kec. Bojongloa kidul</li> <li>15. Kec.cibeunying kaler</li> <li>16. Kec.cibiru</li> <li>17. Kec.cinambo</li> <li>18. Kec.mandalajati</li> <li>19. Kec.panyileukan</li> <li>20. Kec.sukajadi</li> <li>21. Kec.sukasari</li> <li>22. Kec.sumur bandung,</li> </ol>
16	<p>Arsip Digital Data Pribadi</p> <p>Permohonan Izin meliputi : a. KTP permohonan izin; b. PBB tahun terakhir;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32</li> <li>2.UU No 11 Tahun 2008 <u>tentang Informasi dan</u></li> </ol>	Tidak Terbatas	Karena berpotensi membuka informasi pribadi	Melindungi hak pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPMPSTSP</li> <li>2. Dispora</li> </ol>
	<p>c. NPWP pribadi; d. Surat bukti pemilikan tanah d. akta notaris</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32</li> <li>2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf b</li> </ol>				

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
17	Arsip Digital Data Perusahaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP Pimpinan / Direktur / Pemilik;</li> <li>• Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak);</li> <li>• Akta pendirian perusahaan;</li> <li>• Ijasah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/Teknik;</li> <li>• Surat Pengesahan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri;</li> <li>• Gambar Lokasi tempat Usaha/Gudang;</li> <li>• Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi;</li> <li>• Gambar /denah tempat usaha;</li> <li>• Sertifikat Tanah, Akte Jual-Beli, SewaTanah Pernyataan Pemilik.</li> </ul>	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32 2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h	Tidak Terbatas	Karena berpotensi membuka informasi pribadi	Meindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan	1. DPMPTSP 2. Dispora
18	Database perizinan meliputi : a. Nama dan alamat pimpinan,  b. Jumlah yang di bayarkan,	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32  2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan pasal 16 huruf b	Tidak Terbatas	membuka informasi pribadi	Meindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	DPMPTSP
19	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai Selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	PD Pasar Bermartabat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
20	Berita acara pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana17 huruf a, huruf h dan huruf i 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis daro penegak perda yang bersangkutan Selama proses pemeriksaan Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi obyek terperiksa - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi obyek terperiksa Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Disbudpar

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
21	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	1. Pasal 79 ayat 1, pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 83 ayat 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan 3. Pasal 59 sd 64 Permendagri No 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan 34system informasi administrasi kependudukan	Sampai dengan terbitnya izin dari Walikota	1. penyalahgunaan data kependudukan 2. Mengungkap data pribadi penduduk yang semestinya terjaga kerahasiaannya	1. Terhindarnya penyalahgunaan data kependudukan 2. terjaga kerahasiaan data peribadi penduduk	1. Kec. Coblong 2. Kec. Astana Anyar 3. Disdukcapil 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5. Kec. Antapani 6. Kec. Babakan Ciparay 7. Kec. Bandung Kidul 8. Kec. Batununggal 9. Kec. Bojongloa Kaler 10. Kec. Bojongloa Kidul 11. Kec. Cibeunying Kaler 12. Kec. Cibiru 13. Kec. Cinambo 14. Kec. Gedebage 15. Kec. Kiara Condong 16. Kec. Lengkong 17. Kec. Mandalajati 18. Kec. Panyileukan 19. Kec. Rancasari 20. Kec. Regol 21. Kec. Sukajadi 22. Kec. Sukasari 23. Kec. Ujung Berung 24. Kec. Bandung Kulon 25. Kec. Bandung Wetan 26. Kec. Batununggal 27. Kec. Cicendo

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
22	Dokumen Pertanahan 1. Akte jual beli tanah 2. Buku B Rincian 3. Kohir/Leter c 4. Verponcing	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan huruf h 2. UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 1998 tentang Pembuatan Akta Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional republik indonesia (perka BPN) nomor 6 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI. pasal12 ayat (4) huruf i perka BPN nomor 6 tahun 2013	Tidak Terbatas	1. Mengungkap data pribadi kepemilikan tanah yang bersifat rahasia 2. Mengindikasikan spekulasi dan mafia tanah, serta pemalsuan dokumen yang terkait pertanahan	1. Melindungi kerahasiaan dokumen kepemilikan tanah 2. Menjaga kerahasiaan masalah tanah 3. Mencegah spekulasi dan mafia tanah	1. Kec. Cicendo 2. Kec. Buahbatu 3. Kec. Antapani 4. Kec. Cinambo 5. Kec. Bojongloa Kidul 6. Kec. Gedebage 7. PDAM Tirtawening 8. Kec. Arcamanik 9. Kec. Cibeunying Kidul
23	SPJ/ alat bukti Pertanggungjawaban Keuangan akan tetapi yang dapat dibuka adalah laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan ke legislatif	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2014 3. PP No. 70 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013 UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/ penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian Hukum	Menjaga informasi mengenai SPJ/ Alat bukti pertanggungjawaban keuangan pada DPPA pada kecamatan	1. Kec. Buah Batu 2. Bagian ORPAD Setda 3. DLHK 4. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda 5. Kec. Antapani 6. Kec. Cinambo 7. Kec. Bojongloa Kidul 8. Kec. Ujungberung
24	Data Base Peserta Didik Nama Siswa yang memuat minimal Nama dan keterangan sekolah, Data Nilai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dikecualikan sampai ada izin dari Wali siswa	siswa dalam lindungan sekolah, dan terhindar dari upaya kriminal	siswa dalam lindungan sekolah, dan terhindar dari upaya kriminal	Dinas Pendidikan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
25	Data Aset Tanah SKPD dan Satuan Pendidikan yang masih dalam proses penetapan status sertifikat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c	Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan keresahan masyarakat	Menyelamatkan Aset Negara dari upaya-upaya pihak yang tidak bertanggung jawab	BPKA
26	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c	Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan keresahan masyarakat	Menjaga iklim kondusif di lingkungan sekolah, SKPD dan Pemerintah Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kec. Bandung Kulon</li> <li>2. Kec. Bojongloa Kidul</li> <li>3. Kec. Mandala Jati</li> <li>4. PD Kebersihan</li> <li>5. Sekretariat DPRD</li> <li>6. Kec. Babakan Ciparay</li> <li>7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>8. Dinas KUMKM</li> <li>9. Satpol PP</li> <li>10. Bagian program design dan kualitas pembangunan setda</li> <li>11. Kec. Antapani</li> <li>12. Kec. Bandung kidul</li> <li>13. Kec.bojongloa kaler</li> <li>14. Kec. Cibeunying kaler</li> <li>5. Kec. Cibiru</li> <li>16. Kec. Cinambo</li> <li>17. Kec. Coblong</li> <li>18. Kec. panyileukan</li> <li>19. Kec. Sukajadi</li> <li>20. Kec. sukasari</li> </ol>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
						21. kec.sumur bandung 22. Kec. ujungberung 23. dinas pangan dan pertanian 24. Disbudpar 25. Diskar PB 26. PDAM Tirtawening 27. BPKA 28. Dinas Penataan Ruang 29. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 30. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda 31. Kec. Coblong 32. Kec. Arcamanik 33. Bagian Umum Setda
27	Database pedagang, ruang dagang, jenis/ kelompok komoditi pasar di lingkungan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung	1. Perwal Nomor 112 Tahun 2008 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja di PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung  2. UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 ayat J dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan dan privasi komputer	PD Pasar Bermartabat
28	Data Jumlah Nominal denda tunggakan Pedagang/ Pengelola	Perjanjian kerja sama	Tidak ada batas waktu	Mengungkap data privasi perusahaan/ pedagang	Terjaga privasi dan menjaga kondusifitas	PD Pasar Bermartabat
29	Register SP2D ditutup akan tetapi Dapat dibuka kalau yang meminta informasi kompeten dalam hidannya	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 pasal 17 huruf i.	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan	BPKA
30	Rekam Medis Pasien	Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 Ayat 2, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1	BAB IV Penyimpanan, Pemysnahan dan Kerahasiaan (Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11), Sampai ada perintah hakim / pengadilan	Kesalahfahaman pasien/ keluarga terhadap tindakan atau pengobatan terhadap pasien karena menggunakan bahasa medis, kesalahfahaman ini sering berujung pada gugatan malpraktek, Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	1. Rumah Sakit Umum Daerah 2. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 3. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut 4. Dinas Kesehatan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
31	Surat Menyurat Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h  2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dinas Perhubungan
32	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. PD Pasar Bermartabat 2. Disbudpar 3. Kec. Bojongloa Kidul
33	Data surat perintah penyegelan yang masih dalam proses (Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Penataan Ruang
34	Data surat perintah pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan bangunan yang masih dalam proses	Perda No.14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Penataan Ruang
35	Dokumen hasil verifikasi SLF	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Terbukanya data aset <del>seseorang/hak Pribadi</del>	Melindungi informasi data aset privasi pemohon	Dinas Penataan Ruang
36	Arsip dokumen keterangan ahli waris	UU. No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan / penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab	Menjaga informasi keterangan waris mengenai data kepemilikan individu perorangan menyangkut privasi kepemilikan pribadi perorangan / keluarga masyarakat	1. Kec. Buahbatu 2. Kec. Antapani 3. Kec. Bojongloa Kidul 4. Kec. Cinambo 5. Kec. Cibiru 6. Kec. Gedebage 7. Kec. Antapani



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
37	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan:  Dokumen Keuangan: SPJ berikut lampirannya,  Dokumen anggaran dan otoritasnya,  Surat Pencairan Anggaran;  Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan;  Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara;  Data Kekayaan alam yang dilindungi;  Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat;  Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)</p>	1 Tahun	Dapat Membahayakan Data Arsip Kantor	Melindungi data Arsip Kantor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat DPRD</li> <li>2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>3. Disbudpar</li> <li>4. Diskar PB</li> <li>5. Satpol PP</li> <li>6. Badan Kesbangpol</li> <li>7. Kec. Bandung kulon</li> <li>8. Kec.coblong</li> <li>9. Kec. Kiaracondong</li> <li>10. Kec. lengkong</li> <li>11. Kec.Mandalajati</li> <li>12. Kec. panyileukan</li> <li>13.Kec. regol</li> <li>14. Kec. sukajadi</li>   <li>15. Kec. sukasari</li> <li>16.Kec. Sumur Bandung</li> <li>17. Dinas perpustakaan</li> <li>18. Kec. Cibiru</li> <li>19. Kec. Gedebage</li> <li>20. BKPP</li> <li>21. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda</li> <li>22. Kec. Bojongloa Kaler</li> <li>23. Kec. Bojongloa Wetan</li> <li>24. Kec. Arcamanik</li> <li>25. Kec. Batununggal</li> <li>26. Disdukcapil</li> <li>27. PD Pasar Bermartabat</li> <li>28.Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak</li> </ol>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
38	Identitas pelapor dan isi laporan penyalahgunaan kewenangan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi □ Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik □ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Menjadikan Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah	Sekretariat DPRD
39	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan telah ditentukan dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Sekretariat DPRD 2. Dinas Pendidikan 3. DLHK
40	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sekretariat DPRD
41	Kunci Sistem Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	1. Sekretariat DPRD 2. Kec.Batununggal
42	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	1. Sekretariat DPRD 2. Kec. Batununggal
43	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	1. Sekretariat DPRD 2. Dinas kebakaran 3. Kecamatan Cibiru 4. Kecamatan Arcamanik
44	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sekretariat DPRD
45	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sekretariat DPRD

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
46	Draf Rencana Kerja Pemerintah DPRD Kota Bandung (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP	Sampai mendapat penetapan dari Wali Kota Bandung	Dapat mengganggu proses p	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. Sekretariat DPRD 2. Bagian Umum Setda
47	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	-Pasal 17b UU No 14/2008 ttg UU KIP; - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 391/KPTS/M/2011	Sampai dengan penyerahan ke dua	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	1. Sekretariat DPRD 2. PDAM Tirtawening
48	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan huruf j;	selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	dapat menjamin objektivitas penilaian/ evaluasi penawaran	1. Sekretariat DPRD 2. Disbudpar 3. Kec. Sukasari 4. Kec. Cibeunying kaler 5. Kec. Coblong 6. Kec. Panyileukan 7. Kec. Sumur Bandung 8. RSUD 9. Kec. Bojongloa Kidul
49	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jas	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia	5 Tahun	perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Sekretariat DPRD
50	Dokumen Proses Penyelesaian Temuan Inspektorat / Badan Pemeriksa	UU No. 14/2008 Pasal 17 Huruf A	Sampai dikeluarkan surat bukti penyelesaian temuan	bisa menimbulkan persepsi yang tidak terkontrol	OPD fokus menyelesaikan temuan dengan baik	Dinas Pendidikan
51	Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dalam kasus Perceraian	UU No. 14/2008 Pasal 6 ayat 3 huruf c	Sampai ada izin tertulis dari pihak berwenang	mengungkap rahasia pribadi	dapat melindungi rahasia pribadi	1. Dinas Pendidikan 2. Disbudpar 3. Kec. Bojongloa Kidul 4. Kec. Cibeunying Kaler 5. Kec. Coblong 6. Kec.Panyileukan 7. Kec. Sukasari 8. Kec.Batununggal 9. Kec.Sukajadi 10. Kec.Gedebage

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
52	Berita Acara pemeriksaan terhadap PNS dalam Kasus Disiplin Pegawai	UU No. 14/2008 Pasal 17 Huruf A dan H	Sampai diputuskannya kasus disiplin pegawai	mengungkap rahasia pribadi	dapat melindungi rahasia pribadi	1. Dinas Pendidikan 2. DLHK
53	Data Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan	UU No. 14/2008 Pasal 17 Huruf H	Sampai ada izin tertulis dari pihak berwenang	penyalahgunaan data dan informasi	terhindar dari penyalahgunaan data dan informasi	Dinas Pendidikan
54	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	UUD RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d. 28h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	1. Dinas Pekerjaan Umum 2. PDAM Tirtawening
55	Proses hukum pegawai yang bermasalah	UUD RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d. 28h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas sampai berkekuatan hukum tetap	Mengungkap Data pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	1. Dinas Pekerjaan Umum 2. PDAM Tirtawening
56	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI berikut bukti-buktinya	Perwal Bandung No. 1338 Tahun 2017 Bab VIII tentang Data Informasi, Aplikasi dan Infrastruktur Pasal 15 ayat 3	Tidak Terbatas	Menimbulkan celah-celah bagi Oknum/LSM/Kelompok Masyarakat untuk memanfaatkan situasi	Bersifat Rahasia	Dinas Pekerjaan Umum
57	Rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh DPU	UUD RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d. 28h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data pribadi pemohon melanggar HAM	Melindungi data pribadi pemohon yang bersifat rahasia	Dinas Pekerjaan Umum
58	DED (Gambar, Spesifikasi, RAB)	Perwal Bandung No. 1338 Tahun 2017 Bab VIII tentang Data Informasi, Aplikasi dan Infrastruktur Pasal 15 ayat 3	Terbatas untuk pelaksana saja	Dapat di salah gunakan oleh oknum seperti pemalsuan dll	Meminimalisir pemalsuan data	1. Dinas Pekerjaan Umum 2. PDAM Tirtawening
59	Dokumen Perizinan	UU No.43 Th 2009 tentang Kearsipan	Selama masih berlaku	Terbukanya data aset seseorang/hak Pribadi	Melindungi informasi data aset privasi pemohon	Dinas Penataan Ruang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
60	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. Dinas Penataan Ruang 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Disbudpar 4. Satpol PP 5. DP3APM 6. Diskar PB 7. BKPP 8. Kec. Bandung Kidul 9. Kec. Bojongloa Kaler 10. Kec. Bojongloa Kidul 11. Kec. Cibiru 12. Kec. Lengkong 13. Kec. Mandalajati 14. Kec. Regol 15. Kec. Sukajadi 16. Kec. Ujungberung 17. Kec. Batununggal 18. Kec. Cibeunying Kaler 19. Kec. Panyileukan 20. Kec. Sukasari 21. Kec. Coblong 22. RSUD 23. DLHK 24. Kec. Arcamanik
61	RTBG (Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung)	Perwal No.1383 Tahun 2016	selama masih berlaku	Mengganggu informasi privasi properti pemohon	Melindungi informasi privasi properti pemohon	Dinas Penataan Ruang
62	Penomoran Bangunan	Perwal No.1383 Tahun 2016	selama masih berlaku	Dapat menyamakan persepsi terkait urutan nomor bangunan	Menghambat proses penomoran bangunan yang tertib	Dinas Penataan Ruang
63	TABG (Tim Ahli Bangunan Administrasi dan Teknis Hasil Verifikasi Tim Ahli Bangunan Gedung)	Perda Nomor 14 tahun 2018	selama masih berlaku	Mengganggu informasi privasi properti pemohon	Melindungi informasi privasi properti pemohon	Dinas Penataan Ruang
64	SLBP (Surat Lisensi Bekerja Perencana data informasi administrasi pemohon surat lisensi bekerja perencana)	Perwal Nomor 796 tahun 2018	selama masih berlaku	Dapat mengganggu Kepentingan perlindungan Hak kekayaan intelektual	Melindungi Hak atas informasi atas kekayaan intelektual	Dinas Penataan Ruang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
65	Peta Foto Udara Kota Bandung Skala 1 : 1000	UU No.4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial, - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;	selama masih berlaku	. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, . Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan Dapat mengganggu privasi seseorang, Mengungkap kekayaan alam dan rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data spasial dan Geospasial	1. Dinas Penataan Ruang 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
66	Dokumen proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penataan Ruang</li> <li>2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>3. Dinas perdagangan dan Perindustrian</li> <li>4. Diskar PB</li> <li>5. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda</li> <li>6. Kec.Babakan Ciparay</li> <li>7. Kec.Bandung Kidul</li> <li>8. Kec. Bandung Kulon</li> <li>9. Kec. Cibeunying Kaler</li> <li>10. Kec. Coblong</li> <li>11. Kec. Sumur Bandung</li> <li>12. Kec. Cibiru</li> <li>13. Kec. Sukasari</li> <li>14. Bagian Humas Setda</li> <li>15. Kec. Bojongloa Kaler</li> <li>16. Kec. Mandalajati</li> <li>17. Kec. Panyileukan</li> <li>18. Kec. Sukajadi</li> <li>19. Kec. Sumur Bandung</li> <li>20. Dinas KUMKM</li> <li>21. Kec. Coblong</li> <li>22. PD Pasar Bermartabat</li> <li>23. Bagian layanan pengadaan setda</li> <li>24. Kec. Batununggal</li> <li>25. PD kebersihan</li> <li>26. Kec. Arcamanik</li> </ol>
67	Data permohonan sewa lahan pemerintah kota bandung	Peraturan Wali Kota Nomor 828 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan sewa tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 427 Tahun 2010	2016	Banyaknya pihak-pihak tertentu memanfaatkan aset lahar Pemerintah Kota Bandung	Melindungi integritas aset	DPKP3

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
68	Data permohonan pengadaan tanah untuk fasilitas umum, perkantoran dan RTH di kota bandung	Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nokmor 99 Tahun 2014 Atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	2018	Banyaknya makelar/cab tanah yang menaikkan harga di luar kewajaran	Melindungi integritas aset	DPKP3
69	Daftar Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman pada Pemerintah Kota Bandung	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2013 Penyediaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman. Dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota	2018	Banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU ke Pemerintah Kota Bandung dikarenakan belum memenuhi persyaratan administrasi dan fisik	Melindungi integritas aset	DPKP3
70	Basis Data Terpadu	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 dan 6: Pengecualian informasi publik, 2. Kepmensos No. 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Tidak ada	1. Data-Data masyarakat dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin yang belum terdata dan belum masuk Basis Data Terpadu	Data - Data masyarakat akan terlindungi	1. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 2. Kec. Cibiru



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
71	Data BPNT	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 dan 6: Pengecualian informasi publik, 2. Peraturan presiden republik indonesia. Nomor 63 tahun 2017. Tentang. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai	Tidak ada	1. Data-Data masyarakat dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat miskin yang belum terdata dan belum masuk Basis Data Terpadu	Data - Data masyarakat akan terlindungi	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
72	Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 dan 6: Pengecualian informasi publik, 2. Permensos RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tidak ada	1. Data-Data masyarakat dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Terdapat data - data yang sifatnya rahasia, karena menyangkut keadaan individu.	Data - Data masyarakat akan terlindungi	1. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 2. Kec.Cibiru
73	Anjuran Dasar Hukum	Tidak Ada	Tidak Ada	Bersifat rahasia bagi para pihak yang berselisih	Mediator Hubungan Industrial Tidak akan mendapat gugatan dari para pihak yang berselisih	Dinas Tenaga Kerja, Tidak ada dasar hukumnya tetapi sesuai dengan prinsip dan sifat Mediasi
74	Identitas Korban Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan	Pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak	Tidak ada batas waktu	Klien tidak akan merasakan kenyamanan, keselamatan dari layanan yang diberikan oleh UPT P2TP2A sebagai keterwakilan Negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya.	Untuk membangun kepercayaan dan rasa aman kepada klien UPT P2TP2A Kota Bandung	1. DP3APM 2. Kec. Bandung Kidul 3. Kec. Cibiru 4. Kec. Batununggal

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
		<p>Bab II mengenai Prinsip-prinsip umum, Angka (3) Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak, Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016,</p>		<p>Kerahasiannya ini sangat diperlukan, mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain</p>	<p>Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bab II mengenai Hak dan Kewajiban Anak, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>· Pasal 64 ayat (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, huruf (b)</li> </ul>		<p>Saksi dan korban akan merasa tidak aman dalam memberikan keterangan yang sebenarnya. Sehingga dapat menghambat proses hukum dan rahabilitasi lainnya.</p>		
		<p>Pasal 5 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban</p>				

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
75	1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	Tidak ada batas waktu	Melanggar kode etik	Menjaga kepercayaan klien terhadap UPT P2TP2A Kota Bandung	DP3APM
76	Psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam rangka pemberian layanan Psikologi	Bab V Kerahasiaan Rekan dan Hasil Pemeriksaan Psikologis, Pasal 24 dalam Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia, Bulan Juni Tahun 2010, Hasil Kongres XI Himpsi, 2010 di Surakarta	Pasal 26 mengenai Pengungkapan Kerahasiaan Data, ayat (1) : Sejak awal Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya.	Akan mempengaruhi kepercayaan klien kepada psikolog, dan dapat menghancurkan harga diri klien ketika orang lain mengetahui masalahnya dan membuatnya tidak percaya diri untuk bermasyarakat.	Klien akan merasa nyaman dalam mengungkapkan permasalahannya sehingga psikolog dapat membantu dengan memberikan masukan-masukan yang tepat.	DP3APM
77	Akta badan Hukum Koperasi	Pasal 17 huruf b UU no. 14/2008 tentang KIP	selama koperasi Berdiri	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi data pribadi Lembaga Usaha / Badan Usaha	Dinas KUMKM
78	Informasi perkara pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf q dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan	1. Disdukcapil 2. Diskar PB 3. Kec.bandung kidul 4. Disbudpar 5. Kec. Cibiru 6. Kec.Arcamanik

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
79	Surat usul/laporan/pengaduan dari SKPd/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	DLHK
80	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi : Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	DLHK
81	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)		Tidak terbatas	Akan mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	DLHK
82	Daftar rencana penempatan CPNS/PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Data mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. DLHK 2. Disbudpar 3. Kec. Batununggal
83	Data Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal		Retensi arsip keuangan 5 s/d 10 tahun	Jika hasil temuan pemeriksaan dan seluruh pertanggungjawaban/SPJ dibuka untuk publik akan menimbulkan interpretasi yang berbeda	Jika sewaktu-waktu diperlukan kembali untuk pembuktian suatu perkara	DLHK
84	Berita Acara dan SK Penerapan Sanksi Administrasi	- PermenLHK No. 2 tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU 32 tahun 2009 ps 63&76 ayat (1) tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menteri, gubernur, atau bupati walikota berwenang dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	Terbatas sampai dengan penerapan sanksi	Menghambat pelaksanaan penerapan sanksi	Melindungi pelaku usaha yang sanksi untuk mencegah penyebaran informasi	DLHK

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
85	Hasil pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak (cerobong) pelaku usaha	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK
86	Hasil pemantauan kualitas udara dalam ruangan (indoor) pelaku usaha	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK
87	Rekomendasi pemenuhan komitmen perizinan pembuangan air limbah ke air permukaan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KU M.I/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Trintegrasi secara elektronik	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK
88	Berita acara verifikasi lapangan permohonan izin pembuangan air limbah ke air permukaan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KU M.I/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Trintegrasi secara elektronik	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK
89	Hasil pemantauan kualitas air limbah pelaku usaha	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
90	Rekomendasi teknis izin pengelolaan B3	Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK
91	Berita acara verifikasi lapangan permohonan izin pengelolaan limbah B3	Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha		DLHK
92	Hasil pemantauan kualitas tanah pada pelaku usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Lampiran V tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
93	Data hasil inventarisasi dan identifikasi penggunaan kantong plastik di pelaku usaha	Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Tidak ada batas waktu	Penyalahgunaan data pelaku usaha	Keamanan Data	DLHK
94	Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahaskan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Disbudpar
95	Dokumen Anggaran dan Otorisasinya: - Surat Pencairan Anggaran b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan		Selama masih berlangsung penyelenggaraannya Selama Status perlindungan masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual Membahayakan pertahanan dan keamanan negara Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	dalam proses penegakkan hukum Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi pertahanan dan keamanan negara Melindungi kekayaan alam yang dilindungi Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan keawatiran masyarakat Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	1. Disbudpar 2. Dinas pangan dan pertanian 3. Diskar PB 4. Bagian program design 5. Kec. Babakan ciparay 6. Kec.cibeunying kaler 7. Satpol PP 8. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda
96	Disposisi Surat Pimpinan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. Disbudpar 2. Kec.sumur bandung 3. Kec. Batununggal 4. Kec. bojongloa kidul 5. Kec. cibeunying kaler 6. Kec. Panyileukan 7. Kec. Sukasari 8. Kec. Coblong,

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
97	Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	1. Disbudpar 2. Kec. Batununggal 3. Kec. Bojongloa kidul,
98	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. Disbudpar 2. DLHK
99	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiunan dan Administrasi Kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Disbudpar 2. Kec. Bandung kulon 3. Kec. Batununggal 4. Kec. Bojongloa kidul 5. Kec. cibeuying kaler 6. Kec. Panyileukan 7. Kec. Rancasari 8. Kec. Sukajadi 9. Kec. Sukasari 10. Kec. coblong
100	Mobil Polisi Rahasia Mobil Jabatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan	Disbudpar
101	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Disbudpar
102	Rencana pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Disbudpar
103	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	1. Disbudpar 2. Satpol PP 3. Kec.bandung kidul 4. Kec. Cibeuying Kaler 5. Kec. Cibiru 6. Kec. Coblong 7. Kec. Panyileukan 8. Kec.Sukasari



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
104	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada obyek wisata tertentu	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer	1. Disbudpar 2. Kec. Cibeunying kaler 3. Kec. Panyileukan 4. Kec. Sukasari
105	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)	Disbudpar
106	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai selesai kasusnya	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi	1. Disbudpar 2. Kec. Cibeunying kaler 3. Kec. Panyileukan 4. Kec. Sukasari
					Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	
107	Laporan pajak pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	1. Disbudpar 2. Kec. Bojongloa kidul
108	Bidang D : - Izin Lama/Naskah Reklame - Polis Asuransi - MOU/Perjanjian Kerjasama - NPWD - Gambar Kontruksi Reklame - STNK - Buku KIR - KTA Asosiasi Reklame - Surat Garansi Bank Pemerintah Jaminan biaya pembongkaran reklame - Foto Lokasi Reklame - Ukuran Reklame	Umum  Surat Sewa  Gambar Kontruksi       Foto Lokasi	Data Base; Data Perusahaan; Data Teknis	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	DPMPSTP

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
109	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Kegiatan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; 2. KEPRES No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya.	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	DPMPTSP
110	Detail Rincian Kegiatan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; 2. KEPRES No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya.	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	DPMPTSP
111	Source Code Aplikasi Dispora	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan	Melindungi/menjaga Source Code yang telah terjamin keamanannya	Dispora
112	Arsip Digital Data Sewa Soir, Gor dan GT Pemohon Izin meliputi: • KTP Pemohon izin; • PBB tahun terakhir; • NPWP Pribadi; • Surat Bukti Pemilikan Tanah; • Akta notaris.	1 .UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2 .UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Pribadi yang bersifat rahasia.	Dispora
113	MoU/SPK yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b.	Untuk kepentingan penyelidikan pihak berwenang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan persaingan usaha tidak Sehat	Menjaga Objektivitas Penilaian	1. Bagian humas seda 2. PD Kebersihan 3. Dinas perdagangan dan Perindustrian
114	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	1. Diskar PB 2. Kec. Mandalajati 3. Kec. Bandung Kidul
115	Kegiatan intelijen terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a dan huruf i.	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen.	Dapat membahayakan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1. Satpol PP 2. Kec. Bandung Kidul

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
116	Laporan hasil pemeriksaan, dan tindaklanjutnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a dan huruf i	Selama masih berlaku.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Satpol PP
117	Daftar aset yang belum di audit BPK	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 pasal huruf i	Tidak Terbatas	Tidak sesuai pasal 297 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, bahwa laporan keuangan dismpikan kepada BPK-RI	Menjaga Kerahasiaan	BPKA
118	Dokumen Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6, UU NO. 43 THN 2009 TENTANG KEARSIPAN	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1.BPPD 2. Bagian ORPAD Setda 3. Kec. Cibeunying Kidul 4. RSUD
119	Identitas Pribadi wajib pajak meliputi: Nama dan Alamat WP	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 16 dan pasal 32, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan pasal 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi /mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	BPPD
120	Data wajib pajak meliputi : Jumlah pembayaran pajak, tanggal pembayaran, jumlah piutang pajak, data potensi pajak, data jumlah pegawai	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE pasal 16 dan pasal 32, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan pasal 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi /mengamankan data pribadi maupun badan hukum yang bersifat rahasia	BPPD
121	Surat Masuk Rahasia	Perwal Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	1 Hari	Potensi terganggunya aktifitas / jadwal Pimpinan dan/atau PD pada tanggal dimaksud akibat penyebaran informasi yang tidak terkendali.	Meminimalisir gangguan eksternal Aktifitas Pimpinan dan/atau PD pada tanggal yang dimaksudkan	Bagian TU Pimpinan Setda
122	Penomoran Surat yang bersifat rahasia	Perwal Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Sampai terlaksananya kegiatan pada surat yang dirahasiakan dimaksud	Potensi gangguan dan perubahan agenda acara yang menyulitkan penyesuaian jadwal berikutnya	Kegiatan terlaksana tepat waktu tanpa banyak mengalami perubahan akibat pengusulan pihak eksternal	Bagian TU Pimpinan Setda

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
123	Data Rekening pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	Perwal Nomor 567 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD	5 Bulan	Potensi gangguan keamanan Instansi /Lembaga pengusulan Hibah Bansos oleh pihak yang tidak bertanggungjawab apabila Nomor Rekeningnya terpublikasi	Menjaga keamanan dan kerahasiaan	Bagian TU Pimpinan Setda
124	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Bandung yang bersifat tertutup meliputi : § Laporan singkat § Catatan rapat § Risalah § Slide presentasi dan/atau § Rekaman, transkrip suara/ pembicaraan dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Selama belum ada tindaklanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	BAGUM Setda
125	Surat – surat memorandum disposisi dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Selama belum ada tindaklanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. BAGUM Setda 2. Kec. Batununggal
126	Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak – pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	BAGUM Setda

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
127	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat (3) huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Selama masih berlaku	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	BAGUM Setda
128	Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang belum di Tindak Lanjuti	Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat (3) huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	BAGUM Setda
129	Naskah kesepakatan bersama	Pasal 1320 KUH Pdt. tentang syarat sahnya perjanjian	sampai masa perjanjian berlaku	mengurangi kepercayaan para pihak	menambah kepercayaan para pihak	Bagian Kerjasama Setda
130	Naskah perjanjian kerjasama	- Pasal 1338 KUH tentang asas mutu perjanjian - Pasal 1339 KUH Pdt. tentang pembatasan dan azas kebebasan berkontrak				Bagian Kerjasama Setda
131	Dokumen Penawaran Peserta	-Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang -Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 -Pasal 7 huruf c Perpres Nomor 16 tahun 2018	30 tahun setelah penetapan pemenang	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penil	Bagian layanan pengadaan setda

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
132	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (berita acara hasil pelelangan/seleksi, laporan hasil evaluasi)	Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018	30 tahun sejak proses evaluasi pengadaan barang/jasa dimulai	Melanggar Etika Pengadaan	Mencegah Penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa	Bagian layanan pengadaan setda
133	Bukti pembayaran/kwitansi pembayaran dan data pendukung lainnya.	Karena sebagai bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	5 tahun sejak penerbitan bukti pembayaran	Melanggar Etika Pengadaan	Mencegah Penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa	Bagian layanan pengadaan setda
134	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Penyusunan dan Mekanisme LPPD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Bagian pemerintahan Setda
135	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1. Bagian Pemerintahan Setda 2. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda
136	Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1. Bagian Pemerintahan Setda 2. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda
137	Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Perwal No. 1354 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kinerja Camat dan Lurah se-Kota Bandung	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Bagian Pemerintahan Setda, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
138	Kertas Kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan huruf j	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya penungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	1. Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan Setda 2. Kec. Coblong 3. Kec. Batununggal 4. Kec. Arcamanik

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
139	- Data SKUM	Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Apabila ada ijin secara legal dari yang bersangkutan	- Data pegawai dan keluarga jika di buka, maka data pribadi pegawai dan keluarga akan diketahui semua orang dan akan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.	- Jika ditutup, maka pegawai dan keluarga akan merasa aman serta terlindungi identitasnya tidak dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab.	1. Kec. Astana Anyar 2. Kec. Babakan Ciparay 3. Kec. Bandung Kulon
140	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat, Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	1. Kec. Bandung Kidul 2. Kec. Cibeunying Kaler 3. Kec. Cibiru 4. Kec. Coblong 5. Kec. Gedebage 6. Kec. Panyileukan 7. Kec. Sukasari 8. Kec.Bojongloa Kaler
141	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional, Mengamankan proses penyusunan kebijakan	1. Kec. Bandung Kidul 2. Kec. Bojongloa Kaler 3. Kec. Cibiru
142	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/ kegiatan	Dapat menghambat proses penegakkan hukum	Membantu kelancaran proses penegakkan hukum	1. Kec. Bojongloa Kaler 2. Kec. Cibiru
143	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS.	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS.	Kec.Bojongloa Kidul
144	Data Hasil Tes Potensi/Komptensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS.	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS.	1. Kec. Bojongloa Kidul 2. Kec. Batununggal
145	Dokumen hasil sidang baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ranking pejabat struktural)		Sampai ada keputusan tetap	- Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS	- Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	Kec. Bojongloa Kidul

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
146	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h;	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.	- dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan	Kec. Bojongloa Kidul
147	Daftar nilai PPKPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h;	selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (Pelantikan)	- dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan	Kec. Bojongloa Kidul
148	Dokumen surat domisili perusahaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17;	sampai dengan proses surat domisili perusahaan	mengungkap rahasia pribadi	melindungan data pribadi	Kec. Bojongloa Kidul
150	Biodata tim pelaksana K3 di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul	UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP	tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi , bisa menyebabkan data dimanfaatkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang tercantum didalamnya	Kec. Cibeunying Kidul
151	Data mutasi pegawai dan perubahan Daftar Ledger Gaji	UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP	tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi , bisa menyebabkan data dimanfaatkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang tercantum didalamnya	Kec. Cibeunying Kidul
152	Daftar Ranmor Kec. Cib. Kidul	UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP	tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi , bisa menyebabkan data dimanfaatkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang tercantum didalamnya	Kec. Cibeunying Kidul
153	Daftar Perpanjangan Pajak STNK	UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP	tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi , bisa menyebabkan data dimanfaatkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang tercantum didalamnya	Kec. Cibeunying Kidul



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
154	Daftar Tanda Terima STNK	UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP	tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi, bisa menyebabkan data dimanfaatkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang tercantum didalamnya	Kec. Cibeunying Kidul
155	database dipelayanan Cibeunying Kidul	UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP	tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi, bisa menyebabkan data dimanfaatkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang tercantum didalamnya	Kec. Cibeunying Kidul
156	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi dan keamanan	Kec. Batununggal
157	Kegiatan Intelejen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; 2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan dan merusak sumber-sumber dan metode intelejen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	Kec. Cibiru
158	Database Program Keluarga Harapan (PKH)	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Diperbolehkan di publish hanya rekapitulasinya bukan database by name by address	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Menimbulkan Kolusi dan Nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	1. Melindungi hak pribadi 2. Melindungi Kolusi dan Nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Kec. Cibiru
159	Biodata ASN yang akan pensiun / data penjaagaan pensiun	UU ITE pasal 26, Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012	Tidak ada batas waktu	Berakibat disalahgunakan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab berkaitan dengan pencairan dana pensiun mengatasnamakan pt. taspen	Tidak ternyadinya penipuan mengatasnamakan pt. taspen sehingga merugikan para asn yg akan pensiun	Kec. Cicendo
160	Usulan pemindahan, promosi jabatan dan Pemberian Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai Penerbitan Keputusan	-Pengungkapan Prematur; - Menimbulkan gejala/konflik di internal OPD	Mencegah konflik organisasi	Kec. Gedebage

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
161	Semua dokumen terkait pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia sesuai Perpres 16 tahun 2008	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, - Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Sampai terbit Perpres baru	Dapat menyebabkan terjadinya Kolusi dan Persaingan usaha yang tidak sehat	Melancarkan proses pengadaan barang/jasa	Kec. Gedebage
162	Hasil test Kemampuan Fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Kec. Mandalajati
163	Dokumen Rotasi / Mutasi / Promosi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf l ;	Selama masih berlaku	Dokumen tidak bisa dipublikasikan karena dokumen bersifat rahasia	tersedianya data lengkap yang dilindungi	Kec. Ujungberung
164	Laporan pemeriksaan bank	UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang telah diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998)	Sampai dengan terbitnya laporan pemeriksaan bank dan sesuai dengan kriteria dalam Undang-undang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu pengungkapan pemeriksaan Bank	PD Bank Pengkreditan Rakyat
165	Informasi nasabah penyimpan dan simpanannya	UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang telah diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998)	Untuk kepentingan perpajakan, pemimpin bank indonesia atas permintaan Mentri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak, Untuk peyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara, pimpinan bank indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. , Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank indonesia dapat memberikan izin kepada polisi	Bertentangan dengan prinsip prinsip kerahasiaan bank dan dapat menimbulkan gugatan dari nasabah dikemudian hari	Terlaksananya ketentuan perbankan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan bank	PD Bank Pengkreditan Rakyat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
166	Notulensi rapat internal perusahaan, kebijakan, berita acara kegiatan internal	Undang-undang KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat i	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Membuka rahasia perusahaan sehingga akan mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	PD Kebersihan
167	Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-undang KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat b	tidak terbatas	Membuka rahasia perusahaan sehingga akan mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	PD Kebersihan
168	Laporan hasil kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satuan Internal Auditor	Undang-undang KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat i dan j	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Mengungkap rahasia pribadi dan Membuka rahasia perusahaan sehingga akan mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak asasi dan rahasia pribadi dan Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	PD Kebersihan
169	Pendapatan/upah masing-masing pegawai	Undang-undang KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat h	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Mengungkap rahasia pribadi dan Membuka rahasia perusahaan sehingga akan mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak asasi dan rahasia pribadi dan Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	PD Kebersihan
170	Perjanjian Kerja sama pegawai	UU No. 8 Tahun 1974 Bab II Pasal 15	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan/Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi/mengamankan data serta pegawai	PD Pasar Bermartabat
171	Data analisis/kajian kepegawaian	UU No. 8 Tahun 1974 Bab III Bagian V Pasal 26	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan/Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi/mengamankan data serta pegawai	PD Pasar Bermartabat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
172	Dokumen sertifikat aset lahan pasar		Tidak Terbatas	Penyalahgunaan/Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Menjaga keamanan legal formal formal perusahaan	PD Pasar Bermartabat
173	Dokumen Kerja sama operasional dengan pihak ketiga		Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	PD Pasar Bermartabat
174	Surat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan legal formal formal perusahaan	PD Pasar Bermartabat
175	Hasil uji kelayakan kerja sama	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan legal formal formal perusahaan	PD Pasar Bermartabat
176	Laporan review dan evaluasi kerja sama	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan legal formal formal perusahaan	PD Pasar Bermartabat
177	Rencana kerja dan anggaran perusahaan	- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2007 tentang PD.Pasar Bermartabat Kota Bandung, - Peraturan daerah kota bandung no. 02 tahun 2012 tentang PD.Pasar Bermartabat Kota Bandung	Tidak Terbatas	- Tidak ada kepentingan/keterlibatan publik secara langsung dalam RKAP PD Pasar Bermartabat karena dalam merealisasikan rencana kerja PD. Pasara Bermartabat, - Kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa perusahaan tidak menggunakan APBD	RKAP merupakan kendali pengeluaran/pendapatan internal perusahaan dalam hal mencapai target/rencana kerja perusahaan	PD Pasar Bermartabat
178	Nama pedagang/pengelola yang menunggak	Kepdir No. 511.2/kep. 17-DP.PB/2008 tentang mekanisme dan pengaturan jasa pelayanan fasilitas pasar PD. Pasar Bermartabat	Setelah ada keputusan tertinggi/pengadilan	Mengungkap data privasi pedagang/pengelola	Terjaga privasi dan kondusifitas	PD Pasar Bermartabat
179	Rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung	UUD RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d. 28h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data pribadi pemohon melanggar HAM	Melindungi data pribadi pemohon yang bersifat rahasia	PDAM Tirtawening

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
180	Dokumen identitas masyarakat	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Perwal Bandung Nomor 1340 tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Kepwa Nomor 480/Kep. 021-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Jika data/dokumen tersebut sudah diaudit oleh BPK/Inspektorat/BPKA/Instansi lain yang berwenang untuk mengaudit data/dokumne rumah sakit	Data atau dokumen tersebut dapat tersebar luas di masyarakat yang menyebabkan data tidak aman	Data atau dokumen tersebut dapat terjaga keamanannya dan tidak tersebar luas di masyarakat	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
181	Dokumen Pengawasan ( Satuan Pengawas Internal)	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Perwal Bandung Nomor 1340 tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Kepwa Nomor 480/Kep. 021-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Jika data/dokumen tersebut sudah diaudit oleh BPK/Inspektorat/BPKA/Instansi lain yang berwenang untuk mengaudit data/dokumne rumah sakit	Data atau dokumen tersebut dapat tersebar luas di masyarakat yang menyebabkan data tidak aman	Data atau dokumen tersebut dapat terjaga keamanannya dan tidak tersebar luas di masyarakat	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	KETERANGAN (Pengusul)
182	Dokumen terkait aset	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Perwal Bandung Nomor 1340 tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Kepwa Nomor 480/Kep. 021-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Jika data/dokumen tersebut sudah diaudit oleh BPK/Inspektorat/BPKA/Instansi lain yang berwenang untuk mengaudit data/dokumne rumah sakit	Data atau dokumen tersebut dapat tersebar luas di masyarakat yang menyebabkan data tidak aman	Data atau dokumen tersebut dapat terjaga keamanannya dan tidak tersebar luas di masyarakat	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
183	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia(SR) dan rahasia (R) dan Kofidensial	Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Daerah	Hingga proses surat tersebut selesai	- Menghambat kebijakan pimpinan - Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja - Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Rumah Sakit Umum Daerah

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA BANDUNG**

**TTD**

**ANTON SUNARWIBOWO, S.T., M.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690810 199703 1 003